

Hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-orde baru tahun 1998-2001 dalam dimensi kontestasi dan hak-hak istimewa militer

Arif Yulianto, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=102091&lokasi=lokal>

Abstrak

Hubungan sipil-militer merupakan faktor yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam membangun ketahanan nasional suatu negara. Oleh karenanya hubungan sipil-militer merupakan isu penting dan abadi yang terus-menerus dikaji, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Di Indonesia, masalah hubungan sipil-militer telah dikaji mulai dari masa kemerdekaan sampai dengan masa pasca-Orde Baru dengan berbagai macam metode pendekatannya. Dari berbagai kajian yang ada saat ini pendekatan model dua dimensi: kontestasi militer dan hak-hak istimewa kelembagaan militer belum dikaji secara mendetail, walaupun sudah dikaji, masih sebatas diseputar politik militer dengan pendekatan yang berbeda pula. Untuk itu kajian hubungan sipil-militer di Indonesia pasca-Orde Baru dengan menggunakan pendekatan dua dimensi: kontestasi militer dan hak-hak kelembagaan militer perlu diketahui.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kebijakan-kebijakan yang dijalankan pemerintahan sipil baru dalam rangka mewujudkan demokratisasi, dan menganalisa reaksi militer terhadap kebijakan tersebut khususnya yang menyangkut wilayah-wilayah penting yang sebelumnya menjadi hak-hak istimewa militer. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan model atau pendekatan memadukan dua dimensi penting yaitu dimensi kontestasi militer dan hak-hak istimewa kelembagaan militer dalam bentuk diagram kontestasi dan hak-hak kelembagaan militer. Dari perpaduan dua dimensi ini dapat diukur dan diketahui, di samping sejauh mana tingkat kontestasi dan hak-hak istimewa kelembagaan militer, juga bagaimana pola hubungan sipil-militer, sehingga dapat disimpulkan bagaimana kondisi hubungan sipil-militer di Indonesia pasca Orde-Baru dari pemerintahan Presiden Habibie sampai dengan Presiden Abdurrahman Wahid.